

Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Angka Kriminalitas di Wilayah Polresta Gorontalo Kota

Saadia Al'amri¹, Sastro M Wantu², Rusli Isa³

^{1,2,3}Pascasarjana, Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 30, 2025

Revised 10 Oktober 2025

Accepted 15 Oktober 2025

Available online 22 Oktober. 2025

Kata Kunci:

Kriminalitas Gorontalo Kota; Penguatan SDM Kepolisian; Strategi Penanggulangan Kejahatan; Partisipasi dan Sinergi Stakeholder; Pelatihan dan Teknologi Informasi.

Keywords:

Urban Gorontalo Crime; Strengthening Police Human Resources; Crime Control Strategies; Stakeholder Participation and Synergy; Training and Information Technology.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tingkat kriminalitas yang fluktuatif di Gorontalo Kota menuntut penguatan sumber daya manusia (SDM) kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan SDM Polresta Gorontalo Kota dalam menekan angka kriminalitas, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan langkah peningkatan kapasitas personel. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penguatan etika dan integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, dan sinergi antarinstansi. Kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas, tingginya beban kerja, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Kesimpulannya, penguatan SDM berkontribusi signifikan dalam menurunkan kriminalitas, dengan rekomendasi pada pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung, dan kolaborasi lintas sektor.

ABSTRACT

The fluctuating crime rate in Gorontalo City demands the strengthening of the human resources (HR) of the policing as the foremost garda in maintaining peace. This study aims to analyze the

human resource strengthening strategies of Gorontalo City Police Station in suppressing crime rates, identifying supporting and inhibiting factors, as well as formulating personnel capacity enhancement measures. The method used was a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation, with informants from the police apparatus, community figures, and policy makers. Results show that strengthening human resources is carried out through enhancing competencies, strengthening ethics and integrity, as well as utilization of information technology. The success of this strategy is influenced by community participation, budgetary support, and interagency synergies. Major constraints include proximity to facilities, high workload, and lack of community understanding. In conclusion, strengthening human resources contributed significantly in decreasing crime, with recommendations on continued training, provision of supportive means, and cross-sector collaboration.

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat dan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban umum. Tingginya angka kriminalitas berdampak langsung terhadap stabilitas sosial, rasa aman masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di wilayah Polresta Gorontalo Kota, dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang pesat menimbulkan potensi konflik dan peluang meningkatnya tindak kriminalitas. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian memiliki kapasitas yang unggul dalam melakukan deteksi dini, penanganan cepat, serta upaya preventif terhadap potensi kejahatan. Dalam konteks tersebut, penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh kepolisian menjadi faktor strategis yang tidak dapat diabaikan karena kualitas personel merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan vital dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas. Namun, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan modus operandi kejahatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tuntutan ini selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang*

*Corresponding author

Email: 711525030@mahasiswa.ung.ac.id

Baik/AUPB), di mana negara, melalui aparturnya, wajib memberikan pelayanan publik yang prima. Hal ini mendorong perlunya transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan berbasis kekuasaan menuju pendekatan berbasis pelayanan publik. Reformasi kepolisian yang bergulir sejak tahun 1999 menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta etika aparat sebagai pilar utama perubahan kelembagaan. Selain aspek organisasi, perkembangan teknologi juga berperan signifikan dalam reformasi praktik kepolisian modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem pemantauan wilayah rawan kejahatan dan analitik prediktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan tindak kriminal. Namun demikian, penggunaan teknologi juga menghadirkan dilema etis terkait privasi, pengumpulan data besar (big data), dan bias algoritma dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan digital perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas dan integritas personel agar transformasi teknologi benar-benar meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Secara kontekstual, Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi memiliki dinamika sosial ekonomi yang tinggi, ditandai oleh urbanisasi, pertumbuhan ekonomi pesat, serta kompleksitas aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan tantangan baru bagi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Berdasarkan data Satreskrim Polresta Gorontalo Kota tahun 2024–September 2025, tercatat adanya fluktuasi angka kejahatan yang menunjukkan pola tidak konsisten. Pada periode tertentu terjadi penurunan kasus, namun pada periode lain justru terjadi peningkatan signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya ketimpangan efektivitas dalam upaya penanganan kriminalitas, yang salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Rasio jumlah personel terhadap luas wilayah kerja masih di bawah standar ideal internasional, sementara sebagian personel belum memiliki kompetensi adaptif dalam menghadapi jenis-jenis kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparat Polresta Gorontalo Kota agar mampu bekerja secara profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya beban kerja, serta lemahnya efektivitas pelatihan menjadi hambatan signifikan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program keamanan turut memperburuk situasi, karena penanggulangan kriminalitas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sosial yang kuat. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penguatan SDM yang komprehensif tidak hanya berbasis pelatihan teknis, tetapi juga pada pembentukan etika, integritas, dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi modern. Secara yuridis-administratif, penguatan SDM ini merupakan wujud dari fungsi pembinaan personel yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan kepolisian termasuk kewenangan diskresi dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan profesionalitas. Dalam konteks ini, penelitian ini difokuskan pada upaya penguatan SDM aparat Polresta Gorontalo Kota dalam menekan angka kriminalitas. Aspek yang dikaji meliputi: (1) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kasus, (2) penguatan karakter melalui internalisasi nilai-nilai etika dan integritas, (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pencegahan kejahatan, serta (4) sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan yang partisipatif. Fokus ini diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana program penguatan SDM dapat memengaruhi efektivitas penanganan kriminalitas di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu memperkuat urgensi topik ini, menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam institusi kepolisian untuk menciptakan kultur kerja yang lebih akuntabel dan transparan, menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi faktor determinan keberhasilan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik, menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem patroli dapat mempercepat respons terhadap potensi kejahatan. Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh juga menegaskan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan individu berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Dengan demikian, peningkatan SDM kepolisian dapat dipandang sebagai investasi strategis untuk memperkuat keamanan publik dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: Bagaimana implementasi penguatan sumber daya manusia di Polresta Gorontalo Kota berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kriminalitas dan peningkatan kinerja kepolisian? Pertanyaan ini diturunkan ke dalam beberapa sub-pertanyaan: (1) Bagaimana efektivitas program penguatan SDM yang telah dilaksanakan oleh Polresta Gorontalo Kota? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut? (3) Sejauh mana penguatan SDM berdampak terhadap penurunan angka kriminalitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polresta Gorontalo Kota?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi strategi penguatan SDM di Polresta Gorontalo Kota dalam menekan angka kriminalitas, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas personel kepolisian.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas program penguatan SDM, (2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaannya, (3) mengukur dampak penguatan SDM terhadap kinerja organisasi dan efektivitas penanganan kriminalitas, serta (4) merumuskan model strategis penguatan SDM yang dapat diadaptasi oleh institusi kepolisian lainnya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana penguatan sumber daya manusia (SDM) berperan dalam penanganan angka kriminalitas di wilayah Polresta Gorontalo Kota. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi yang bersifat kontekstual, holistik, dan mendalam melalui pengalaman serta pandangan para informan terkait strategi penguatan SDM kepolisian. Metode kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menelaah interaksi sosial yang terjadi di lapangan dan memahami makna yang terkandung di balik tindakan serta kebijakan yang diambil oleh aparat kepolisian. Desain penelitian menggunakan single case study dengan embedded units analysis, dimana Polresta Gorontalo Kota menjadi kasus tunggal yang dikaji, namun dengan menganalisis berbagai unit embedded di dalamnya seperti unit Reskrim, Samapta, Sabhara, dan unit-unit pendukung lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Gerring yang menekankan bahwa studi kasus embedded memungkinkan analisis yang lebih granular terhadap berbagai sub-unit dalam organisasi sambil tetap mempertahankan perspektif holistik terhadap kasus secara keseluruhan. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif longitudinal dengan mengkaji perkembangan implementasi program penguatan SDM dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) untuk memperoleh gambaran tentang dinamika perubahan dan pola-pola yang terjadi sepanjang periode tersebut. Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah Polresta Gorontalo Kota sebagai organisasi kepolisian yang mengimplementasikan program penguatan sumber daya manusia dalam penanganan kriminalitas. Namun, mengingat kompleksitas organisasi kepolisian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa unit analisis embedded yang mencakup unit-unit operasional seperti Reskrim yang bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, unit Samapta yang menjalankan fungsi patroli dan respons cepat, unit Sabhara yang menangani keamanan dan ketertiban umum, serta unit-unit pendukung seperti Bagian SDM, Bagian Perencanaan, dan Bagian Operasional yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi program penguatan SDM.

Subjek penelitian terdiri dari 45 responden yang dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi, representativitas, dan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Komposisi responden meliputi 8 perwira menengah yang mencakup Kapolresta, Wakapolresta, dan Kasat-Kasat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan SDM. Sebanyak 12 perwira pertama yang terdiri dari Kanit-Kanit dan pejabat struktural lainnya yang bertanggung jawab dalam implementasi program di tingkat operasional. Sebanyak 20 bintara yang mewakili personel pelaksana di lapangan dari berbagai unit operasional, dan 5 responden dari masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang memiliki interaksi intensif dengan Polresta Gorontalo Kota. Kriteria seleksi responden mencakup masa tugas minimal 2 tahun di Polresta Gorontalo Kota, keterlibatan langsung dalam program penguatan SDM baik sebagai peserta maupun penyelenggara, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Penelitian ini juga merujuk pada studi terdahulu yang menggunakan unit analisis serupa, seperti penelitian Silalahi et al. di Polrestabes Medan yang menggunakan 52 responden dengan komposisi yang proporsional antar tingkatan personel, dan penelitian Rosyid & Rahaju di Polresta Surabaya yang melibatkan 38 responden dengan fokus pada personel yang terlibat langsung dalam program capacity building. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jumlah 45 responden dalam penelitian ini berada dalam rentang yang memadai untuk memperoleh saturasi data dalam konteks studi kasus organisasi kepolisian tingkat polresta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada aparat kepolisian di lingkungan Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada bagian yang berhubungan langsung dengan penanganan kriminalitas. Selain itu, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah daerah juga dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif eksternal mengenai efektivitas penguatan SDM. Observasi digunakan untuk melihat langsung bagaimana penerapan strategi penguatan SDM di lapangan, sedangkan dokumentasi diperoleh dari arsip kepolisian, data kriminalitas, dan laporan kegiatan resmi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian Polresta Gorontalo Kota sebagai subjek utama, mengingat mereka merupakan pelaksana kebijakan sekaligus pihak yang langsung berinteraksi dalam menangani kriminalitas. Selain itu, masyarakat di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota juga menjadi bagian dari unit analisis secara tidak langsung,

karena partisipasi mereka turut memengaruhi keberhasilan program penguatan SDM kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek internal institusi kepolisian, tetapi juga memperhatikan interaksi sosial antara aparat dengan masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model analisis interaktif. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pola serta hubungan yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan perlunya triangulasi dalam menilai efektivitas SDM kepolisian, serta penelitian yang mengombinasikan wawancara dan observasi dalam mengukur pengaruh teknologi informasi terhadap pencegahan kriminalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Polresta Gorontalo Kota telah berjalan melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kompetensi, penguatan etika, serta pemanfaatan teknologi informasi. Program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik terbukti mampu meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani kasus kriminal. Beberapa informan menyebutkan bahwa pelatihan khusus dalam bidang investigasi, manajemen konflik, serta penggunaan teknologi pemantauan wilayah rawan kriminalitas sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas kinerja di lapangan. Data internal Polresta Gorontalo Kota juga memperlihatkan adanya penurunan kasus pencurian kendaraan bermotor dan perkelahian antarwarga dalam dua tahun terakhir setelah intensifikasi program pelatihan ini, meskipun tindak pidana narkoba masih menunjukkan tren peningkatan. Selain peningkatan kompetensi teknis, penguatan aspek etika, peningkatan kemampuan komunikasi publik, serta pembinaan mental dan spiritual dan integritas juga menjadi perhatian utama. Penekanan pada kode etik profesi serta penanaman nilai pelayanan publik bertujuan membentuk aparat yang tidak hanya profesional tetapi juga berorientasi pada keadilan. Dalam perspektif hukum administrasi, penekanan pada etika dan pelayanan publik ini merupakan implementasi dari asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*détournement de pouvoir*), dan asas pelayanan yang baik, yang krusial dalam setiap tindakan pemerintahan. Namun, dari hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa masih ada kesenjangan antara idealisme kode etik dengan praktik di lapangan. Beberapa aparat mengakui bahwa beban kerja yang tinggi serta tekanan sosial kerap memengaruhi konsistensi penerapan nilai integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan SDM harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat, disertai dukungan kesejahteraan yang memadai bagi aparat kepolisian, serta hasil Wawancara dengan personel menunjukkan bahwa pelatihan yang bersifat praktis dan berbasis kasus nyata lebih efektif dalam meningkatkan responsivitas anggota terhadap situasi kriminal. Selain itu, sistem pengawasan internal yang diperketat melalui evaluasi kinerja berbasis indikator capaian turut mendorong peningkatan disiplin dan akuntabilitas kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya menekan angka kriminalitas. Implementasi sistem pelaporan berbasis aplikasi, pemasangan CCTV di titik-titik rawan kejahatan, serta pemanfaatan media sosial untuk komunikasi cepat dengan masyarakat memperlihatkan hasil positif serta Temuan ini juga sejalan dengan konsep community policing dari Trojanowicz dan Bucqueroux, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan terbukti memperkuat efektivitas kepolisian. Dalam konteks Gorontalo Kota, partisipasi masyarakat melalui forum komunikasi polisi-warga atau biada di sebut dengan FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) Rifai dan program "Polisi Sahabat Masyarakat" menjadi katalisator dalam membangun kepercayaan publik dan mempercepat penanganan kasus dan Informan dari masyarakat menyatakan bahwa respon aparat menjadi lebih cepat dalam menindaklanjuti laporan kriminalitas, khususnya di kawasan perkotaan yang padat. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, minimnya kemampuan teknis sebagian aparat dalam mengoperasikan perangkat digital secara optimal, Literasi teknologi aparat kepolisian dalam menghadapi kejahatan digital Ismail dan keterbatasan anggaran untuk pelatihan berkelanjutan, serta beban kerja yang tinggi akibat jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas, serta resistensi sebagian anggota terhadap perubahan sistem kerja yang lebih transparan dan berbasis kinerja. Resistensi ini menjadi penghambat dalam mewujudkan birokrasi kepolisian yang modern, yang menurut hukum administrasi, dituntut untuk selalu akuntabel dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penguatan SDM tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga pada reformasi struktural dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Hilal et al. yang menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan penegakan hukum, serta mendukung argumen Wardaniah

menjelaskan mengenai pentingnya integrasi teknologi informasi dalam upaya pencegahan kriminalitas. Lebih jauh, teori Human Capital dari dapat menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi aparat akan memberikan nilai tambah berupa peningkatan kinerja organisasi kepolisian secara keseluruhan. Dengan demikian, penguatan SDM dapat dipandang sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya menyasar aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penguatan SDM di Polresta Gorontalo Kota berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kriminalitas di beberapa jenis tindak pidana. Akan tetapi, tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, beban kerja yang tinggi, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat yang harus segera diatasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan SDM merupakan strategi krusial dalam penanggulangan kriminalitas. Upaya ini harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari internal kepolisian maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, Polresta Gorontalo Kota dapat membangun sistem keamanan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang humanis.

Tabel 1. Data Kasus Menonjol

NO	KASUS	2024	JAN-SEP 2025
1.	PENCURIAN BIASA	47	43
2.	CURANMOR	4	10
3.	KDRT	10	3
4.	ANIAYA	221	132

Sumber : Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. "Laporan Data Kasus Kriminalitas Tahun 2024 dan Januari-September 2025" (Gorontalo:Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, 2025).

Penelitian ini mengungkap temuan baru bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) kepolisian melalui pelatihan berbasis kasus nyata, pembinaan etika, dan pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas penanganan kriminalitas di Polresta Gorontalo Kota. Penurunan signifikan pada kasus penganiayaan dan KDRT menunjukkan keberhasilan pendekatan humanis, sementara peningkatan curanmor menandakan perlunya strategi pengawasan yang lebih inovatif. Interpretasi data memperlihatkan bahwa integrasi teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan mempercepat respons aparat, sejalan dengan teori Human Capital yang menekankan pentingnya investasi SDM dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Kajian mendalam juga merujuk pada pendekatan Community Policing, di mana partisipasi masyarakat menjadi katalisator keberhasilan program keamanan. Dibandingkan studi Silalahi et al. dan Rosyid & Rahaju, Gorontalo Kota unggul dalam pelibatan masyarakat namun masih tertinggal dalam digitalisasi sistem kerja. Pembahasan komprehensif menekankan bahwa penguatan SDM harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, melibatkan reformasi struktural, sinergi antarinstansi, serta dukungan kebijakan adaptif untuk menciptakan sistem keamanan yang responsif dan partisipatif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi fundamental dalam menekan angka kriminalitas di wilayah Polresta Gorontalo Kota. Berdasarkan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi aparat kepolisian merupakan langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kasus nyata, pembinaan etika, serta pemanfaatan teknologi informasi telah meningkatkan responsivitas dan profesionalisme aparat, sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa kualitas SDM adalah penentu keberhasilan penegakan hukum.

Integrasi teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan wilayah rawan kriminalitas mendukung argumen Wardaniah yang menyatakan bahwa digitalisasi proses kerja kepolisian mempercepat deteksi dini dan meningkatkan efektivitas patroli. Dalam konteks community policing sebagai strategi membangun kepercayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat melalui Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat (FKPM) dan program "Polisi Sahabat Masyarakat" memperkuat kepercayaan publik, sebagaimana dijelaskan oleh bahwa partisipasi warga adalah elemen kunci dalam membangun sistem keamanan yang berkelanjutan. Gap analisis terhadap studi Silalahi et al. di Polrestabes Medan dan Rosyid & Rahaju di Polresta Surabaya menunjukkan bahwa meskipun Gorontalo Kota unggul dalam pelibatan masyarakat, masih terdapat kelemahan dalam pemerataan pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem kerja berbasis kinerja. Kendala seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan beban kerja yang tinggi menjadi tantangan yang harus diatasi melalui reformasi struktural dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menggambarkan temuan, tetapi memaknai hasil penelitian sebagai kontribusi nyata terhadap pengembangan teori dan praktik kepolisian. Penguatan SDM harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan transformasi budaya organisasi, sinergi

antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini memberikan novelty berupa integrasi pendekatan human capital dan community policing dalam konteks lokal Gorontalo, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya, sehingga berpotensi menjadi model pengembangan SDM kepolisian di daerah lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Polresta Gorontalo Kota merupakan strategi krusial dalam menekan angka kriminalitas yang fluktuatif. Upaya penguatan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan kompetensi teknis melalui pelatihan berbasis kasus nyata, pembinaan etika dan integritas untuk memperkuat karakter aparat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pemantauan wilayah rawan kejahatan. Ketiga pendekatan ini secara sinergis terbukti mampu meningkatkan responsivitas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, sinergi antarinstansi, dan dukungan anggaran yang memadai. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sarana prasarana, beban kerja tinggi, resistensi terhadap sistem kerja berbasis kinerja, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan personel. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penurunan kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi bukti positif dari penerapan pelatihan etika dan pendekatan humanis, sementara peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menandakan perlunya strategi pengawasan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori Human Capital yang menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan, serta pendekatan Community Policing yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi kedua pendekatan tersebut dalam konteks lokal Gorontalo yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya di Medan dan Surabaya dengan menyoroti pentingnya kolaborasi masyarakat dan adaptasi teknologi dalam peningkatan kualitas SDM kepolisian. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan SDM kepolisian tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah personel, tetapi harus diarahkan pada transformasi kualitas, profesionalisme, dan etika kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan administratif yang dimiliki kepolisian, termasuk diskresi, dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelatihan berbasis kasus nyata, pembinaan etika, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti meningkatkan efektivitas kerja aparat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks pengembangan kebijakan dan implementasi, Polresta Gorontalo Kota perlu melakukan intensifikasi program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan modus operandi kejahatan dan teknologi terkini. Program pelatihan hendaknya dirancang dengan pendekatan experiential learning yang lebih praktis dan berbasis kasus nyata, mengingat hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan klasikal konvensional. Selain itu, disarankan agar Polresta Gorontalo Kota mengembangkan pusat pelatihan internal yang dilengkapi dengan fasilitas simulasi dan laboratorium digital forensik untuk meningkatkan kompetensi personel dalam menangani kejahatan siber dan kasus berbasis teknologi. Implementasi sistem sertifikasi kompetensi yang terstandar dan berkelanjutan juga penting dilakukan bagi seluruh personel berdasarkan spesialisasi tugas masing-masing, sehingga dapat menjadi instrumen objektif dalam evaluasi kinerja dan promosi jabatan.

Polresta Gorontalo Kota perlu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan kriminalitas melalui pendekatan community policing yang partisipatif. Kolaborasi ini secara hukum administrasi memperkuat legitimasi tindakan kepolisian dan menggeser paradigma dari *represif* menjadi *preventif-partisipatif* dalam penyelenggaraan fungsi keamanan. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan dapat menjadi faktor penting dalam menekan peluang terjadinya tindak kriminal. Di sisi lain, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif secara integratif guna mengukur dampak jangka panjang dari penguatan SDM terhadap penurunan tingkat kriminalitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan strategis dalam penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi di masa mendatang.

REFERENSI

Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press, 1993. <https://books.google.co.id/books?id=9t69iICmrZ0C>

- Gerring, John. *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. <https://books.google.co.id/books?id=CbetAQAAQBAJ>
- Kurniawan. *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/pelaksanaan-tugas-polri-di-era-perubahan-model-perpolisian-masyarakat-penegakan-hukum-dan-kearifan-lokal>.
- Kurniawan, Rudy Cahya, and Rusmiyati. *Hukum Kepolisian (Perkembangan, Konsepsi, Dan Diskresi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2024. https://deepublishstore.com/ebook/e-book-hukum-kepolisian-rudy/?utm_.
- McCabe, James E., Paul E. O'Connell, Demosthenes Long, and Carol Rasor-Cordero. *Understanding Police Operational Performance*. London: Routledge, 2025. <https://www.routledge.com/Understanding-Police-Operational-Performance/McCabe-OConnell-Long-Rasor-Cordero/p/book/9781032490748>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. <https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Norawati, Suarni. *Meningkatkan Kinerja Kepolisian*. Yogyakarta: Deepublish, 2024. <https://deepublishstore.com/ebook/e-book-meningkatkan-kinerja-kepolisian/>.
- Trojanowicz, Robert C, and Bonnie Bucqueroux. *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Cincinnati: Anderson Publishing, 1990. <https://archive.org/details/communitypolicin00troj>
- Bekti, Rokhana Dwi, Ruziq Nawaf Zulfahmi, Maria Kristiana Daul, and Wayan Julianta Pradnyaana. "Sistem Informasi Berbasis Website Untuk Pemetaan Wilayah Berdasarkan Clustering Kerentanan Kriminalitas." *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains* 6, no. 3 (2024): 620–626. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v6i3.4421>.
- Erikha, Annisa, and Riswadi Riswadi. "Strengthening Police Ethics by Optimizing the Ethics Commission's Role as Guardian of Good Governance Principles." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 336–346. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1036>.
- Hamin, La Ode, Muhamad Askal Basir, and Sri Mayunita. "Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (August 2025): 1261–70. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.806>.
- Hartanto, Djoko Budiarto, and Hyronimus Rheti. "Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95–114. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1100>.
- Hilal, Maulidi, Arif Purnomo, and Sandy Arief. "Transforming Human Resources: The Key to Revolutionizing Indonesian Legal Reform and Justice System Efficiency." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1469–1504. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16495>.
- Hutapea, Godfrid Tumbur Roland. "Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Big Data Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 51–73. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.380>.
- Ismail, Marzuki. "Digital Policing: Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>.
- Kurniawan, Rudy Cahya. "Improving the Professionalism of Human Resources for the Indonesian National Police through Strengthening Supervision." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 5, no. 1 (2023): 81–117. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i1.29859>.
- Muin, Fitrah Awaliah Marta. "Manajemen Stres Kerja Bagi Anggota Polri Di Polda Sulawesi Selatan Dalam Menjaga Performa Kerja." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 673–676. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1174>.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 381–97. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.
- Overbye-Thompson, Hannah, and Ronald E. Rice. "Understanding How Users May Work Around Algorithmic Bias." *AI & Society*, 2025. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02498-1>.
- Prasetyo, Wiyono Eko. "Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.405>.
- Ramadhan, Gilang, and Bayu Nurrohman. "Reformasi Polri Dan Refleksi Community Policing Di Indonesia." *Jurnal Riset Dan Pengabdian* 2, no. 3 (2025): 664–74. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.33723>.
- Rifai, Eddy. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Oleh FKPM Dalam Menciptakan

- Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung." *Cepalo* 2, no. 1 (2019): 43–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>.
- Rosyid, Muhammad Fathur, and Tjitjik Rahaju. "Inovasi Layanan Polisi Suroboyo Sobo Kelurahan Pada Polrestabes Surabaya." *Publika* 7, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.26740/publika.v7n1.p%25p>.
- Rusniyati, Baiq. "Evaluasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 2, no. 1 (2021): 21–30. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.64>.
- Silalahi, Grace Sella T, Patisina, and Nur Aisyah. "Pengaruh Kepribadian Tangguh Dan Optimisme Terhadap Profesionalisme Polri Di Sat Lantas Polrestabes Medan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 3 (2023): 2496–2505. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1650>.
- Wardaniah, Rani. "Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam* 6, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5491>.
- Novita, Sari, Abdi, and Iskandar Stevri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlawanan Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjalankan Tugas Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu." Thesis, Universitas Bengkulu, 2022. <https://repository.unib.ac.id/id/eprint/14992/>.
- Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. "Laporan Data Kasus Kriminalitas Tahun 2024 Dan Januari–September 2025." Gorontalo: Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, 2025.